

PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Nelly Saadah Aprillia, Rida Perwita Sari

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: nelly.saadah.ns@gmail.com, ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki maksud untuk menguji dan membuktikan pengaruh variabel transparansi public dan pengawasan tentang variabel pengelolaan APBD pada pemerintah Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan quantitative method. Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling serta jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik mempublikasikan kuesioner atau angket kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi public tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD, sedangkan variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Kata kunci: *Tranparansi Publik, Pengawasan dan Pengelolaan APBD*

Abstract

This study aims to test and prove the effect of the variable of public transparency and supervision on the variable of APBD management in the government of Gresik Regency. This study uses a quantitative method. The location of the research was conducted in the government of Gresik Regency. The sampling technique used is purposive sampling and the type of data in this study uses primary data. The data collection technique used in this study is the technique of publishing questionnaires or questionnaires to respondents. The analytical technique used in this study uses the WarpPLS 8.0 application. The results of this study indicate that the variable of public transparency has no effect on the management of the APBD, while the variable of supervision has an effect on the management of the APBD.

Keywords : *Public Transparency, Regional Budget Supervision and Management*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik ialah suatu metode akuntansi yang memiliki tanggungjawab di sektor publik. juga berkaitan langsung dengan penduduk maupun pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah memiliki suatu organisasi yang dituntut untuk bertanggungjawab dalam membagikan

pelayanan utama bagi masyarakat juga memberikan pembagian tugas yang baik bagi pemerintah (Novitasari & Amanah, 2016)

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan dalam organisasi atau instansi pemerintah yang tidak dimaksudkan buat mencari keuntungan dan merupakan bagian dari

disiplin ilmu. Rakyat mewajibkan agar pemerintah mampu mengelola anggaran secara bertanggung jawab, terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi di pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan semua informasi kepada publik secara terbuka dan jujur sehingga pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memantaunya (Arifani et al., 2018).

Dalam Anugriani (2013) dalam mengelola anggaran, akuntabilitas, transparansi dan pengawasan penting untuk dilakukan karena hasil akhir dalam mengelola anggaran dikatakan dapat dibagikan secara terbuka kepada masyarakat atau public dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa kasus dalam melakukan pengelolaan anggaran yang belum efektif menyatakan bahwa dalam merealisasi penganggaran dalam sektor publik harus berlandaskan pada proses transparansi, dan pengawasan internal (Novitasari & Amanah, 2020).

Berdasarkan dari data bangsaonline.com bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik tahun 2019 telah sepakat menjadikan anggaran sebesar Rp 3,129 triliun dalam rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (29/11/2019). Angka ini kembali menurun dari target semula yang direncanakan dalam nota keuangan APBD 2019 sebesar Rp 3,138 triliun. Munir mengungkapkan terkait menurunnya pendapatan dan belanja pada APBD 2019 menyebabkan tak tergapainya sejumlah PAD.

Pada tahun 2020 pada masa pandemi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik mengalami penurunan. Catur Dadang selaku Anggota Badan Anggota (Banggar) mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 anggaran APBD Gresik 2020 mengalami penurunan, menjadikan dari total APBD 2020 yang telah disepakati sebesar Rp 3.414.635.118.176,00, diperkirakan turun tinggal Rp 2.845.971.232.667,00. Mengalami penurunan sebesar Rp 568.663.885.509,00.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik

berhasil menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap APBD 2021, pendapatan disepakati sebesar Rp 3,2 triliun. Dengan perincian, pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp 1,13 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 70 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah disepakati sebesar Rp 3,4 triliun. Dengan perincian, belanja operasional sebanyak Rp 2,2 triliun, belanja modal Rp 467 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp 23 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 704 miliar (Radar, 2020).

Masyarakat menduga dalam proses mengelola keuangan daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) transparansi, dan pertanggungjawaban dapat diterapkan dengan baik. Bukti dari diterapkannya transparansi dan pertanggungjawaban dalam melayani kepada masyarakat adalah dengan cara adanya berita pertanggungjawaban.

Hal yang dapat disaksikan dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya hasil menurut proses transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti suatu satuan pemerintah baik pusat maupun daerah. transparansi didasarkan pada sirkulasi berita yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami agar dapat dimengerti dan dikendalikan. Hal yang dapat disaksikan pada pengelolaan APBD ini tampak maka pemberitahuan terhadap masyarakat belum mendapatkan pengawasan pemerintah mengenai pengelolaan APBD secara terbuka, tepat waktu dan akurat kepada masyarakat, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak ikut serta dalam proses pembangunan dan pengelolaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki maksud untuk membenarkan dan membuktikan pengaruh transparansi public dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan keterbatasan sehingga peneliti memilih lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggal yaitu Pemerintah Kabupaten Gresik. Selain minimnya penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya tentang pengelolaan APBD sehingga peneliti tertarik memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian.

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah bahwa hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dengan uang dan segala bentuk kekayaan dapat dijadikan milik daerah yang bersangkutan. wilayah. Pendanaan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pinjaman
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pembayaran tagihan pihak lain
3. Pendapatan Daerah;
4. Pembiayaan Daerah;

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah menitikberatkan pada pengelolaan APBD sebagai bentuk perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan public (Sriwijayanti, 2018)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau diringkas APBD adalah metode perencanaan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun tahunan dan ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat (Sriwijayanti, 2021).

Transparansi Publik

Komponen dalam pemerintahan yang baik yaitu salah satunya Transparansi. Dalam menyelenggarakan pemerintah dapat membuat suatu strategi berita pemerintahan yang dapat dibuka langsung oleh masyarakat. Sirkulasi berita yang mandiri, seluruh berita, teknik pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang terkait yang dapat dibuka oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Novitasari & Amanah, 2020)

Transparansi mengandung arti adanya berita yang cukup, benar dan informasi yang tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses perumusannya. Informasi merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan. Dengan tersedianya berita, warga dapat berpartisipasi dan memantau agar kebijakan publik yang diberlakukan dapat memberikan hasil yang tepat untuk masyarakat, serta mencegah penipuan dan manipulasi yang hanya menguntungkan masyarakat secara tidak proporsional bagi sekelompok orang (Arifani et al., 2018).

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya berita mengenai kebijakan, proses pembangunan, implementasi dan hasilnya. Transparansi akhirnya akan

membuat akuntabilitas mendarat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang bersih, efisien, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.(Mete, 2020).

Pengawasan

Menurut PP No 12 Tahun 2017 Mengenai Tata Cara Mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 14 ayat (2) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan arahan dan program pemantauan kinerja pemerintah daerah sesuai kawasannya dalam arsip perencanaan dan anggaran daerah serta alokasi untuk pembangunan pemerintah daerah. dan pengawasan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pasal 14 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran Pembinaan dan Pengawasan dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

METODE

Penelitian ini menggunakan quantitative method dengan pegawai Bappeda dan BPPKAD secara keseluruhan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Gresik selaku Populasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 39 bidang yang ada di Bappeda dan BPPKAD dengan jumlah pegawai berjumlah 191 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria Kepala Bidang, Wakil Bidang, Sekretaris 1, Sekretaris 2, bagian keuangan dan bidang anggaran. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang ditentukan ditemukan 10 sampel yang memenuhi kriteria di bidang Bappeda dan BPPKAD, sehingga dalam penelitian ini terdapat 60 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Lease Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Responden

Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 60 eksemplar. Dalam penelitian ini, profil responden diurutkan berdasarkan jumlah responden, jenis kelamin, umur, jabatan, tingkat pendidikan, dan lama bekerja.

Tabel 1 Deskripsi Kuesioner Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesioner yang disebar	60	100%
kuesioner yang kembali	54	90%
Kuesioner yang tidak kembali	6	10%
Kuesioner Yang memenuhi syarat	52	86,7%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	2	3,3%

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pegawai Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel 2 Pembagian Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki - Laki	21	39%
2	Perempuan	33	61%
Total		54	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 2 menghasilkan hingga jumlah terbanyak informan kategori perempuan yaitu sebanyak 33 orang (61%), dan 21 orang (39%) informan yang kategori laki-laki. Jadi penyaluran data informan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan lebih banyak informan dengan kategori perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan umur pegawai Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	21	39%
2	31-40	14	26%
3	41-50	14	26%
4	>50	5	9%
Total		54	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 21 orang (39%). Responden berusia 31-40 tahun sebanyak 14 orang (26%). Sedangkan sisanya berusia 41-50 tahun sebanyak 14 orang (26%), dan >50 tahun sebanyak 5 orang (9%) dari seluruh responden yang mengisi kuesioner. Jadi penyaluran data responden berdasarkan usia menghasilkan bahwa banyak responden dengan rentang umur 21-30 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan pegawai Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Kepala Bidang	2	4%
2	Wakil Kepala Bidang	2	4%
3	Sekretariat 1	6	11%
4	Sekretariat 2	7	12%
5	Bagian Keuangan	20	37%
6	Bidang Anggaran	15	28%
Total		52	96%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang paling tinggi mengisi kuesioner menjabat dalam Bagian

Keuangan sebanyak 20 orang (37%). Responden yang menjabat dalam Bagian Anggaran sebanyak 15 orang (28%). Sedangkan responden lainnya menjabat sebagai sekretariat 1 sebanyak 6 orang (11%) sedangkan sekretariat 2 sebanyak 7 orang (12%). Responden yang menjabat sebagai Kepala Bidang sebanyak 2 orang (4%) dan yang menjabat sebagai wakil kepala bidang sebanyak 2 orang (4%).. Dengan begitu penyaluran data responden berdasarkan jabatan menghasilkan data yang paling tinggi yaitu responden yang menjabat dalam Bagian Keuangan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	1	2%
2	D3	3	6%
3	S1	47	87%
4	S2	3	6%
Total		54	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 5 menghasilkan bahwa kebanyakan responden menyandang derajat pendidikan S1 yakni sebanyak 47 orang (87%). Responden yang berpendidikan SMA sebanyak 1 orang (2%), sedangkan selebihnya memiliki derajat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (6%), dan S2 sebanyak 3 orang (6%) dari jumlah responden yang memenuhi kuesioner. Dengan demikian penyaluran data responden berdasarkan derajat pendidikan menghasilkan bahwa lebih banyak responden dengan tingkat pendidikan jenjang S1 (Strata 1).

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan lama bekerja pegawai Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Gresik:

Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1	1-10 tahun	31	57%
2	11-20 tahun	8	15%
3	21-30 tahun	5	9%
4	31-40 tahun	0	0
Total		44	81%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 6 menghasilkan bahwa responden yang paling banyak memiliki masa kerja 1-10 tahun yaitu sebanyak 31 orang (57%). Responden yang masa kerjanya 11-20 tahun sebanyak 8 orang (15%). Sedangkan responden yang masa kerjanya 21-30 tahun sebanyak 5 orang (9%). Dengan demikian distribusi data responden berdasarkan lama bekerja menunjukkan lebih banyak responden dengan masa kerjanya 1-10 tahun.

Analisis Partial Least Square Uji Outer Model

Uji outer model digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas suatu data dalam PLS. Pengujian validitas data yang dilakukan pada outer model terbagi menjadi dua yaitu validitas convergent dan validitas discriminant. Mengenai reabilitas dapat diukur menggunakan composite reliability.

Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Validitas konvergen (convergent validity) adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikator. Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antar indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor item dengan skor variabel laten yang diestimasi dengan program PLS.

Ukuran refleksi satu-satunya diucapkan tinggi jika berangkaian lebih dari 0,6-0,7. Secara umum, nilai outer loading 0,4-0,7 dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi, ketika saat dieliminasi meningkatkan nilai composite reliability atau average variance extrracted. Berikut adalah hasil coba pengecekan kualitas data dengan uji convergent validity yang dilihat dengan nilai loading factor.

Tabel 7 Outer Loading (Tahap 1)

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Transparansi Publik (X1)	X1.1	0,876	Valid
	X1.2	0,887	Valid
	X1.3	0,756	Valid
	X1.4	0,906	Valid
	X1.5	0,923	Valid
	X1.6	0,929	Valid
	X1.7	0,329	Tidak Valid
Pengawasan (X2)	X2.1	0,761	Valid
	X2.2	0,738	Valid
	X2.3	0,790	Valid
	X2.4	0,756	Valid
	X2.5	0,795	Valid
	X2.6	0,840	Valid
	X2.7	0,790	Valid
	X2.8	0,756	Valid
	X2.9	0,626	Tidak Valid
	X2.10	0,752	Valid
Pengelolaan APBD (Y)	Y.1	0,830	Valid
	Y.2	0,747	Valid
	Y.3	0,692	Tidak Valid
	Y.4	0,740	Valid
	Y.5	0,611	Tidak Valid
	Y.6	0,843	Valid
	Y.7	0,737	Valid
	Y.8	0,780	Valid
	Y.9	0,799	Valid
	Y.10	0,797	Valid
	Y.11	0,769	Valid

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Tabel 7 menghasilkan bahwa kebanyakan nilai loading factor yang dihasilkan lebih dari 0,7 kecuali pada

indikator (X2.7, X3.9, Y.3, dan Y.5) menghasilkan bahwa nilai loading factor kurang dari 0,7, maka dilakukan pengujian kembali dengan versi mengeliminasi indikator yang nilai loading factor kurang dari 0,70. Maka dari hasil pengecekan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya indikator yang harus dieliminasi atau dihapus karena indikator tersebut tidak memenuhi syarat batas minimum pengukuran. Dan dilaksanakan ulang pengecekan validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap kedua.

Tabel 8 Outer Loading (Tahap 2)

Variabel	Indikator Loading	Nilai
Transparansi Publik (X1)	X1.1	0,876
	X1.2	0,887
	X1.3	0,756
	X1.4	0,906
	X1.5	0,923
	X1.6	0,929
Pengawasan (X2)	X2.1	0,761
	X2.2	0,738
	X2.3	0,790
	X2.4	0,756
	X2.5	0,795
	X2.6	0,840
	X2.7	0,790
	X2.8	0,756
	X2.10	0,752
	Pengelolaan APBD (Y)	Y.1
Y.2		0,747
Y.4		0,740
Y.6		0,843
Y.7		0,737
Y.8		0,780
Y.9		0,799
Y.10		0,797
Y.11		0,769

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Tabel 8 menghasilkan bahwa kebanyakan nilai loading factor yang dihasilkan lebih dari 0,7 melainkan pada indikator (X2.7, X3.9, Y.3, dan Y.5) menunjukkan bahwa nilai loading factor kurang dari 0,7, maka dilakukan pengujian

kembali dengan versi mengeliminasi indikator yang nilai loading factor kurang dari 0,70. Dari hasil tersebut menunjukkan jika indikator tersebut harus dieliminasi atau di hapus karena hasil tersebut tidak sesuai dengan batas minimum pengukuran. Dengan demikian dilaksanakan ulang pengujian validitas konvergen berdasarkan outer loading tahap kedua.

Setelah dilakukan percobaan ulang dengan menghapus indikator yang nilainya kurang dari 0,7 maka tabel 8 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7 dan tingkat signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel X1, X2 dan Y adalah valid secara signifikan. Validitas convergent juga bias dilihat dari nilai AVE untuk masing-masing konstruk.

Tabel 9 Nilai AVE

Variabel	AVE
X1	0.691
X2	0.781
X3	0.607
Y	0.624

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

menurut tabel 4.14 dapat diberikan tanggapan jika seluruh konstruk memenuhi kriteria valid karena AVE lebih dari 0,5.

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari setiap konstruk atau variabel laten berbeda dengan yang lain.

Tabel 10 Discriminant Validity

Indikator	X2	X3	Y
X1.1	-0.878	0.216	0.261
X1.2	-0.896	0.102	0.071
X1.3	-0.74	0.314	0.22
X1.4	-0.906	0.28	0.247
X1.5	-0.928	0.2	0.247
X1.6	-0.938	0.225	0.205
X2.1	0.276	-0.757	0.371
X2.2	0.337	-0.741	0.413
X2.3	0.203	-0.794	0.575
X2.4	0.11	-0.759	0.544
X2.5	0.104	-0.794	0.418

X2.6	0.17	-0.841	0.535
X2.7	0.385	-0.795	0.526
X2.8	0.109	-0.764	0.432
X2.10	0.052	-0.762	0.382
Y.1	0.254	0.538	-0.841
Y.2	0.281	0.574	-0.717
Y.4	0.112	0.549	-0.712
Y.6	0.105	0.506	-0.839
Y.7	0.062	0.444	-0.761
Y.8	0.063	0.359	-0.811
Y.9	0.548	0.493	-0.806
Y.10	0.251	0.375	-0.823
Y.11	-0.011	0.449	-0.786

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk variabel akuntabilitas public, transparansi public, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada pemerintah Kabupaten Gresik telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai cross loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak ada variabel lain.

Uji Realibilitas

percobaan ini dilaksanakan dengan maksud untuk percobaan apakah setiap variabel laten reliable untuk dianalisis. Reliable atau apakah mungkin membuat alat ukur dengan mempertimbangkan nilai composite reliability dan cronbach's alpha. Apabila nilai composite reliability dan cronbach's alpha dari variabel menghasilkan nilai >0,7, maka variabel tersebut dapat diucapkan reliabel dan dapat dipercaya.

Tabel 11 Nilai Uji Realibilitas

Variabel	composite reliability	cronbach's alpha	Keterangan
X1	0.961	0.955	Reliabel
X2	0.955	0.943	Reliabel
X3	0.933	0.919	Reliabel

Y	0.937	0.924	Reliabel
---	-------	-------	----------

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai hasil uji composite reliability dan cronbach's alpha pada tiap variabel yang tidak terukur menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0,7, yaitu indikator cocok pada pengukuran ini.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi structural dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2) dan relevansi produktif (Q2).

R-Square (R2)

Percobaan mode dengan metode partial least square dimulai dengan melihat nilai R-Square atau koefisien determinasi untuk setiap variabel laten independen.

Tabel 12 Nilai R-Square

Variabel	R-Square
Y	0,475

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0,47. Hal ini berarti bahwa variabel Pengelolaan APBD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel transparansi public (X1), pengawasan (X2) sebesar 47,5%. Sedangkan sisanya 52,5% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Predictive Relevance (Q2)

Predictive Relevance (Q2) memperkirakan seberapa baiknya nilai hasil dari pengamatan yang dihasilkan dan mengestimasi parameter dalam sebuah model struktural.

Tabel 13 Nilai Q2

Variabel	Q-Square
Y	0.444

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Dalam penelitian Q-Square menunjukkan bahwa terdapat nilai 0,444 dimana lebih besar dari nol (0), sehingga memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive yang relevan.

Pengujian Hipotesis

Tahap ini bertujuan akan melihat signifikansi pengaruh antar variabel dan mengevaluasi arah pengaruh pada setiap jalur hipotesis. Percobaan hipotesis ini menggunakan Partial Least Square (PLS), didukung dengan software WarpPLS 8.0. Pengujian hipotesis ini dapat melalui nilai probabilitas (P-Value) dengan tingkat signifikan 5%.

Tabel 14 Hasil Path Coefficient dan P-Value

Variabel	Path Coefficient	P-Value	Result
Transparansi Publik (X1) -> Pengelolaan APBD (Y)	0.156	0.115	H ₂ Ditolak
Pengawasan (X2) -> Pengelolaan APBD (Y)	0.578	<0.001	H ₃ Diterima

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS 8.0.

Transparansi Publik Tidak Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD

Menurut hasil uji coba tabel 14 dapat dinyatakan bahwa variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini akan dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.156 dan P-Value sebesar 0.115 > 0,05, syarat diterimanya hipotesis yaitu nilai koefisien regresi bernilai positif dan P-Value < 0,05. Dengan demikian H₂ dinyatakan ditolak bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD.

Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan APBD

Berdasarkan hasil uji coba tabel 14 dapat dinyatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.578 dan P-Value sebesar < 0.001.

Dengan demikian H₃ dinyatakan diterima bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBD.

Pembahasan

Transparansi public tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah karena kurangnya transparansi anggaran kepada publik. Hal ini membuat masyarakat merasa masih banyak kesenjangan dalam transparansi pengelolaan keuangan di daerah ini dan perlu ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mete, D. D., & Amanah, L. (2020). Sementara hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Sriwijayanti, 2018) yang menerangkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD. Novitasari, D., & Amanah, L. (2020) yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD yang memiliki makna jika anggaran berjalan dengan baik, dapat dipengaruhi oleh pengawasan yang baik dan dalam instansi pemerintah. Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terdapat kesenjangan atau kendala dalam penganggaran, diharapkan kendala tersebut dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan tindakan korektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari, D., & Amanah, L. (2020), Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). Yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa transparansi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Sedangkan hasil pengujian dan pembahasan bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBD.

2. Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas public dan transparansi public dalam pengelolaan APBD sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kabupaten Gresik mengenai pengelolaan APBD agar menjadi tolak ukur masyarakat serta dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan APBD.

Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas public dan transparansi public dalam pengelolaan APBD sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kabupaten Gresik mengenai pengelolaan APBD aga

DAFTAR PUSTAKA

Arifani, C., Agustinus Salle, & Rante, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 68–82.

Mete, D. D. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–23.

Novitasari, D., & Amanah, L. (2020).

Pengaruh akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja anggaran.

Novitasari, D., & Amanah, L. A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12).

Sriwijayanti, H. (2018). *DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang)*. 7(1), 89–101.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah

PP No 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 89–101. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6>